



# **Standar Pengelolaan Dokumen & Informasi Hukum**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL**

## Sri Handayani S.T., M.B.A

- TTL : Rumbai, Pekanbaru, 11 September 1984
- NIP : 19840911 201012 2 001
- Pangkat (Gol/Ruang) : Penata (III/c)
- Pendidikan :
  - Sarjana Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
  - *Master of Business Administration (MBA), Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada.*
- Riwayat Jabatan :
  - Kepala Sub Bidang Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum , Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN
- HP : 081291095341 WA: 0899 0501 477
- E-mail : [aya.bphn@gmail.com](mailto:aya.bphn@gmail.com)
- NPWP : 78.194.615.7-211.000





Teknis Pengolahan  
Dokumen Hukum



Perpres 33 Tahun 2012

Standar Website  
JDIH



Permenkumham 8  
Tahun 2019



# MATERI

# Perpres Nomor 33 Tahun 2012

## Bab III

Tugas Dan Fungsi Pusat Dan Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional



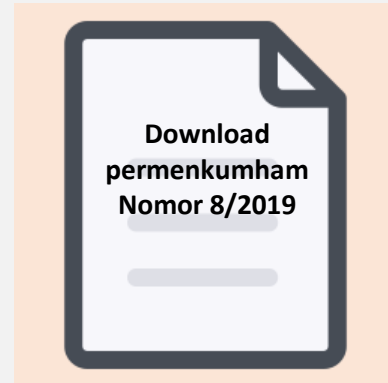
## Pasal 10 Ayat 2 Huruf B

Pembangunan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Diintegrasikan Dengan Website Pusat JDIHN



### “Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum”

Instrumen untuk menciptakan Keseragaman Pengelolaan Bahan Dokumentasi, mempercepat Penemuan Kembali Bahan Dokumentasi, dan meningkatkan Pelayanan dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum.



Standar Pembuatan Abstrak Per-UU



Standar Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum



Standar Laporan Evaluasi JDIHN



# Abstrak Peraturan Perundang-undangan

## Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan

1. Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan, sumber, dan judul
2. Dasar Pertimbangan (meringkas dasar menimbang dan atau penjelasan umum peraturan)
3. Dasar Hukum (ditulis secara hierarki, dengan cara penulisan : singkatan jenis, nomor dan tahun peraturan)
4. Materi Pokok (meringkas isi yang terkandung dalam batang tubuh)
5. Catatan (tanggal berlaku, peraturan terkait, peraturan yang dicabut/diubah)

PERMENDAGRI NO.84, BN 2014/NO.1837, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 19 PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23 PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011 tentang Standar Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan PERMENDAGRI tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 2010; PERPRES No.88 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.10 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.40 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.41 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengorganisasian yang mana Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, ditingkat Kecamatan dilimpahkan kepada Camat. Perekrutan sukarela dan terbuka, yang masa kerjanya sampai 60 tahun atau sampai diberhentikan. Tugas, hak, kewajiban dan pemberdayaan Satlinmas. Menteri melakukan pembinaan umum, Gubernur, Bupati/Walikota pembinaan teknis operasional. Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota  
selanjutnya dilaporkan ke Gubernur kemudian ke Menteri melalui Ditjen Pemerintahan Umum, yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2014

- Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Permen ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ini

- Lamp. : 1 hlm.

- Lamp. : 1 hlm.

ditjen pemerintahan umum

undangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya



# Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum



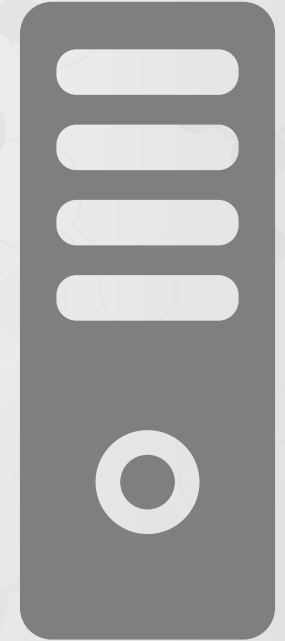
**Standar Website JDIH**



**Standar Metadata**



**Integrasi JDIHN**



# Standar Teknis Website JDIH

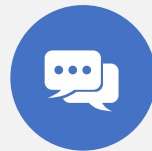
## Nama Domain

[https://jdih.\(instansi\).go.id](https://jdih.(instansi).go.id)  
<http://jdih.kemenkopukm.go.id>



## Logo Pusat JDIHN

Memuat Logo Pusat JDIHN di pojok kiri atas layar



## Daftar Link

Menampilkan daftar link website anggota di bawah instansinya



## Kontak kami

Alamat dan kontak person pengelola JDIHN



Link Tautan Portal JDIHN

## Struktur Organisasi

Struktur Organisasi JDIH Instansi



## Konten

Konten/isi dalam aplikasi JDIH harus berisi Dokumen Hukum



## Search engine

Terdapat penelusuran/ *search engine*



## Indeks Kepuasan

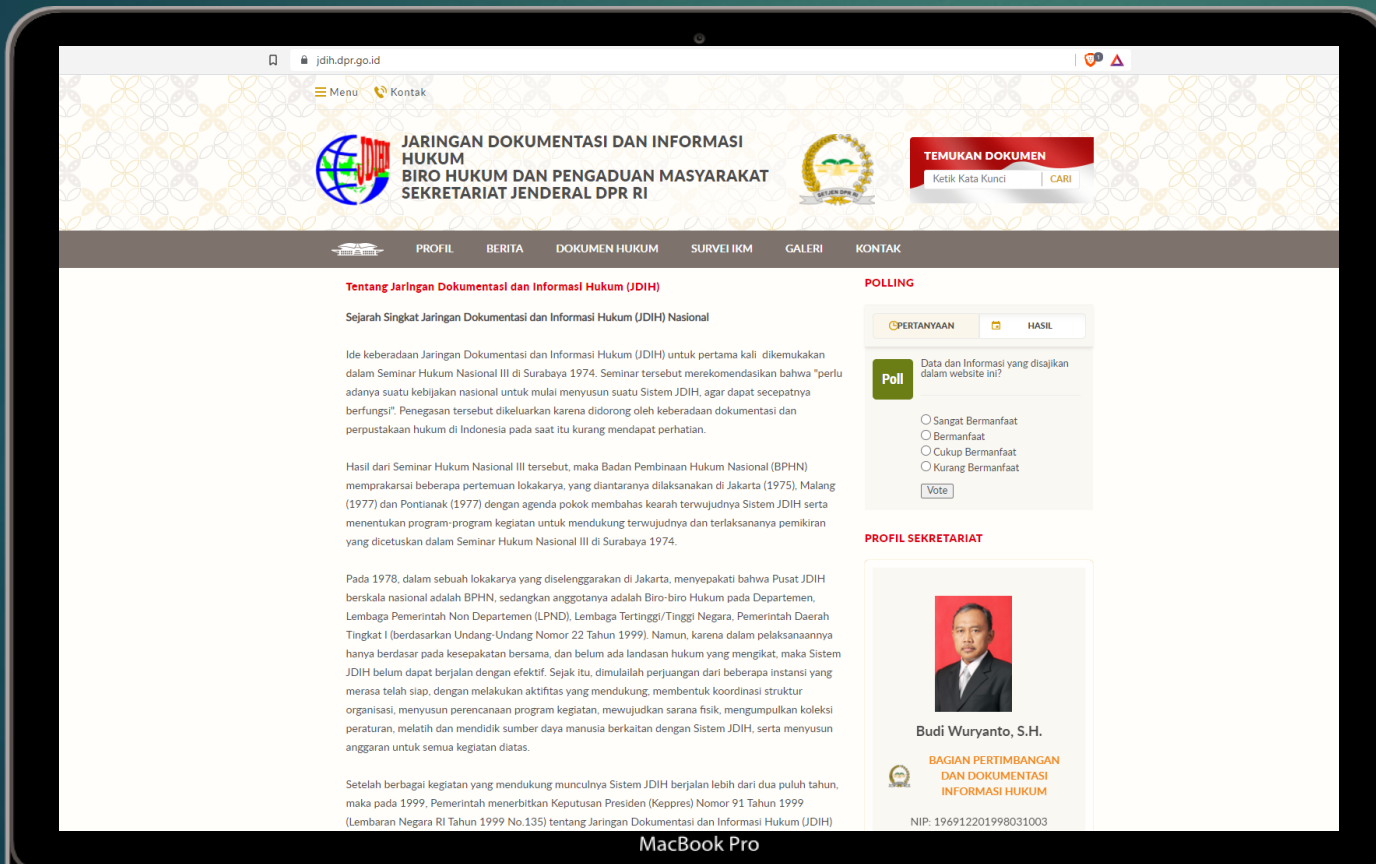
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi JDIHN







# Evaluasi Tampilan Website JDIH SETJEND DPR RI



1

Domain Sesuai dan sudah secure (<https://jdih.dpr.go.id/>)



2

Logo Pusat JDIH  
(di pojok kiri layar website)



3

Struktur Organisasi Pengelola JDIH



4

Konten/Dokumen Hukum  
Peraturan Perundang-undangan



5

Kontak Pengelola Web JDIH



6

Advance Search Engine



7

IKM (Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat)



8

Link Tautan Portal JDIH



9

Berita : masih kosong



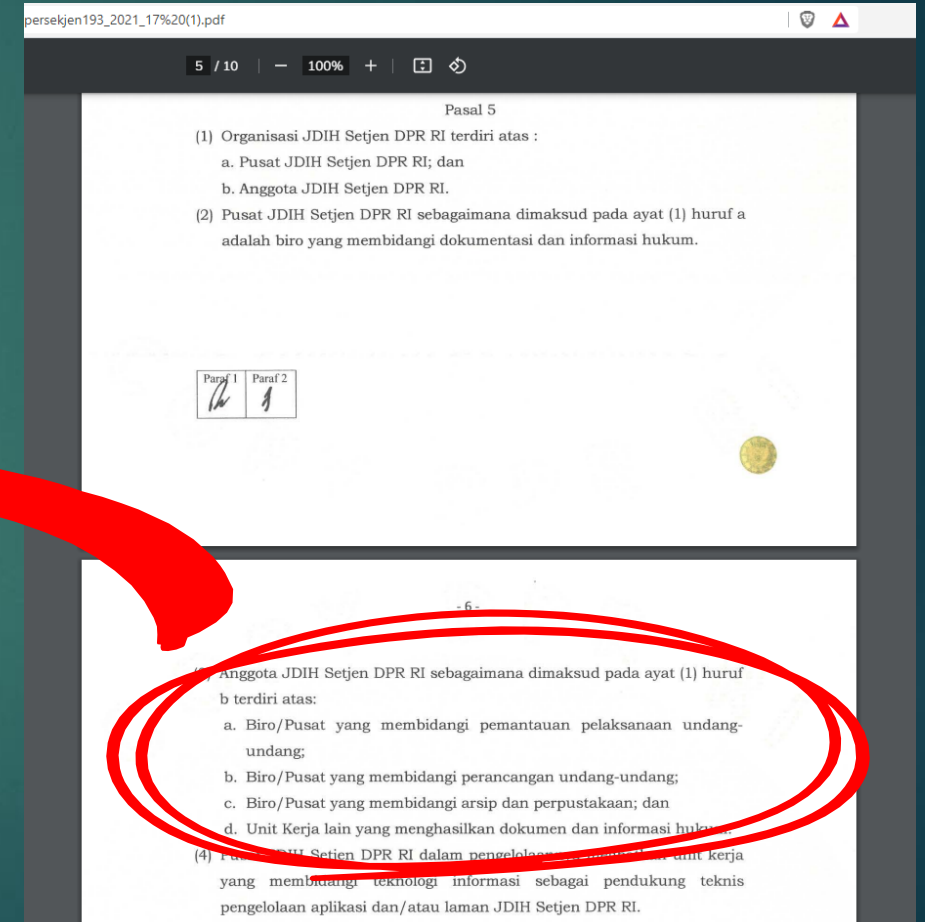
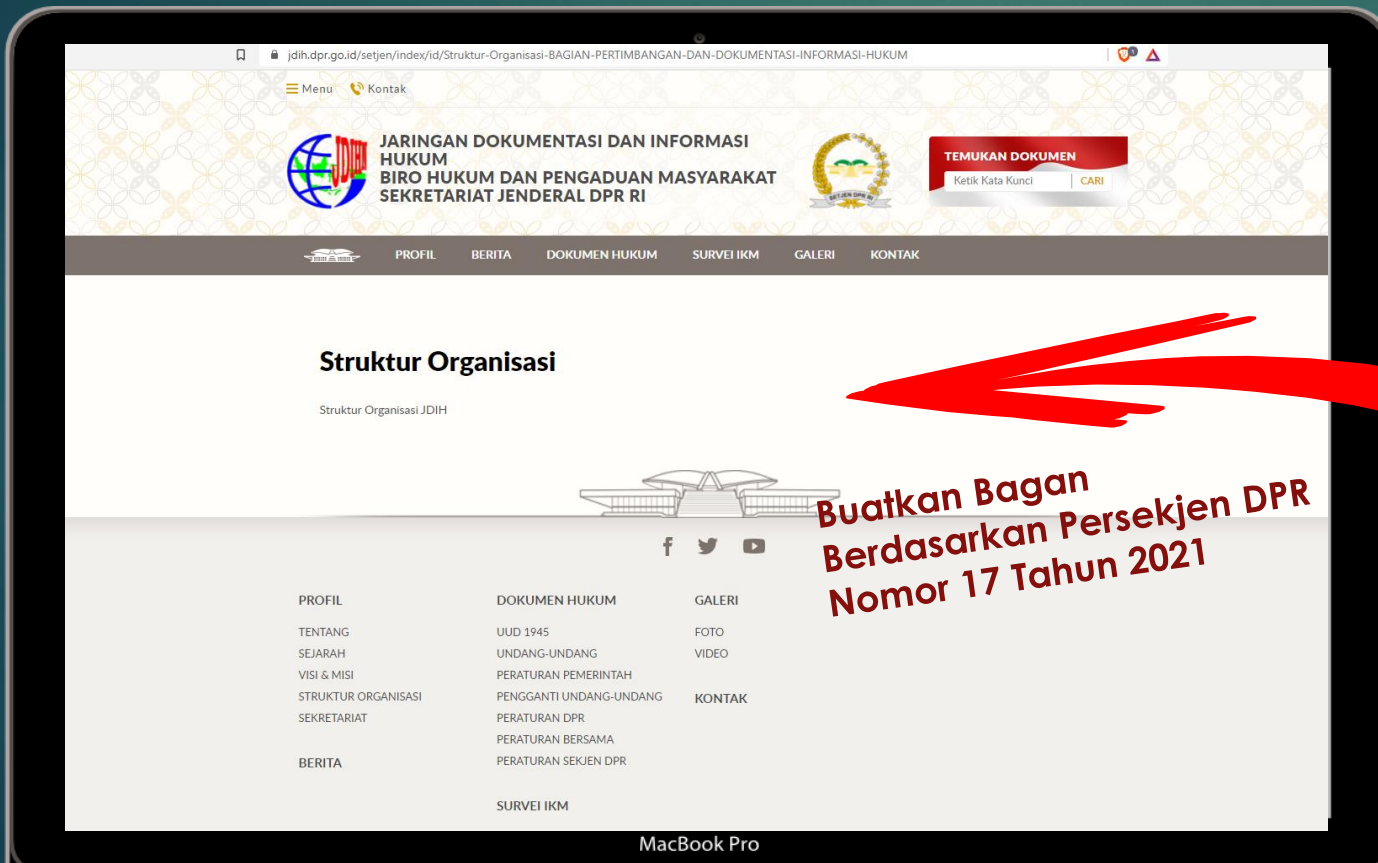
10

URL Integrasi : aktif



# Evaluasi Tampilan Website JDIH SETJEND DPR RI

Struktur Organisasi Pengelola JDIH DPR RI  
: **masih kosong**





# Evaluasi Website / Laman JDIIH

Berdasarkan PermenkumHAM No. 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen & Informasi Hukum

jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/peraturan\_dpr/id/37

Menu Kontak

## Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

### METADATA

UNDUH BERKAS

Judul	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Tajuk Entri Utama (T.E.U)	Indonesia.Dewan Perwakilan Rakyat
Nomor	2018
Bentuk Peraturan	Peraturan DPR
Singkatan Bentuk Peraturan	PerDPR
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	31 October 2018
Tanggal Pengundangan	27 December 2018
Sumber	BN 2018 (1752): 31 hlm.
Subjek	TATA TERTIB PERUBAHAN KETIGA
Status	Berlaku
Status Peraturan	
Keterangan Status	Mengubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Perubahan Ketiga)
Bahasa	Indonesia
Lokasi	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Lampiran	2018perdpr002.pdf

- Metadata : sudah sesuai Standar Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019

Catatan:

- Keterangan Status: Dibuat link ke peraturan target

# Contoh Pengisian Metadata Peraturan

Berdasarkan PermenkumHAM No. 8 Tahun 2019



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Tanggal penetapan**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2018

**Tanggal pengundangan**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG SOESATYO

**penandatanganan**

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

**sumber**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1752

Judul ditulis lengkap!!

# Contoh Pengisian Metadata Peraturan

Berdasarkan PermenkumHAM No. 8 Tahun 2019

**Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib**

Tempat Terbit  
DKI Jakarta

Tanggal Pengundangan  
2018-12-27

Urusan Pemerintahan  
Indonesia

Bahasa  
Indonesia

Penandatanganan  
BAMBANG SOESATYO

Tanggal Penetapan  
31 Oktober 2018

Sumber  
BN 2018 (1752) : 31 hlm.

Bidang Hukum  
Hukum Administrasi Negara

Pemrakarsa  
DPR RI

#### Peraturan Terkait

Melaksanakan : [UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH](#)

Melaksanakan : [UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN](#)

#### Dokumen Terkait

Data belum Tersedia

#### Hasil Uji Materi

Data belum Tersedia

#### T.E.U BADAN

Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
Indonesia.Dewan Perwakilan Rakyat	Badan Organisasi	Pengarang Utama

SUBJEK : TATA TERTIB -

#### JENIS DOKUMEN

PERATURAN DPR

#### STATUS

Berlaku

#### Lampiran

[2018perdpr002.pdf](#)

[2018abspdr002.pdf](#)

#### Keterangan Status

mengubah [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib](#)

**Ket. Status terdiri dari:**

- **Mencabut**
- **Dicabut**
- **Mengubah**
- **Diubah**

● Judul : **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib**

Format Judul : **Huruf kapital di setiap awal kata saja**

● Sumber : **BN 2018 (1752): 31 hlm..**

Format Sumber : **Singkatan Berita Negara- Tahun - (Nomor Berita Negara) : jumlah halaman.**

● Bidang Hukum : **Hukum Administrasi Negara**

● Urusan Pemerintahan **Yustisi**

● Penandatanganan : **BAMBANG SOESATYO**

Format Penandatanganan : **Tuliskan nama saja tanpa gelar**

● Pemrakarsa : **DPR RI**

(instansi yang memprakarsai lahirnya peraturan ini)

● Peraturan Terkait: **Dasar yuridis pembentukan peraturan tersebut (Lihat konsideran menimbang)**

● Subjek : **TATA TERTIB**

Subjek : **Topik/ kata kunci dari isi dokumen peraturan (ditulis huruf capital/UPPERCASE)**

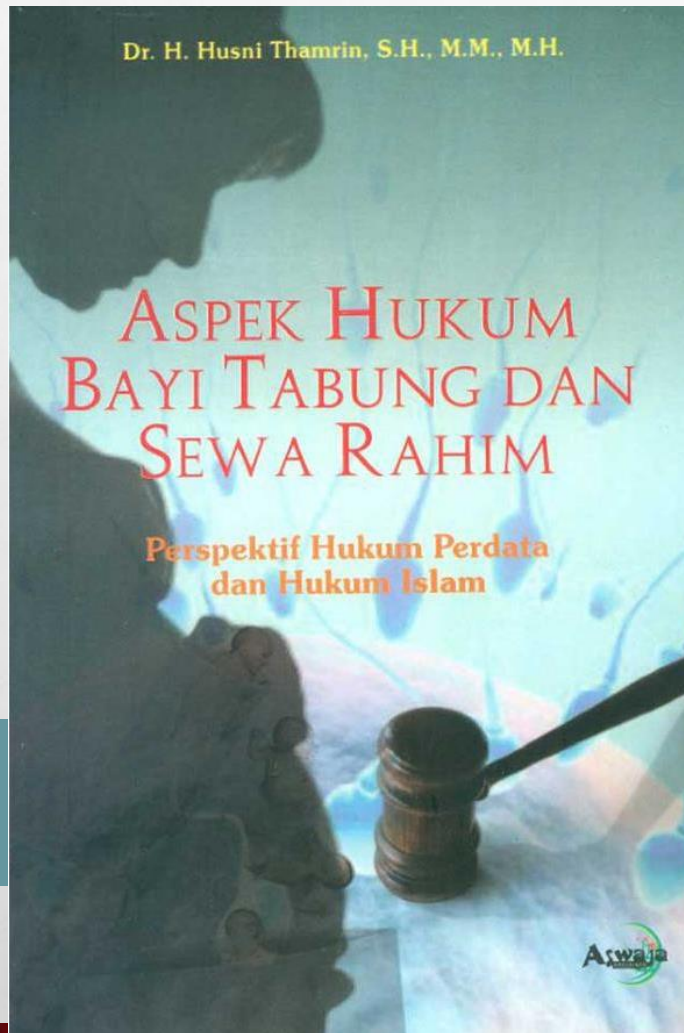
● Penamaan File : **2018perdpr002.pdf**

Format Penamaan File : **(tahun peraturan)(jenis peraturan)(nomor peraturan).pdf**

● Keterangan Status: **Mengubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014**

**Dibuat link ke peraturan target, dengan syarat peraturan target sudah diinputkan sebelumnya.**

# Contoh Pengisian Metadata Monografi Hukum



Metadata	Keterangan	Contoh Pengisian
Judul	Huruf Besar hanya diawal judul, selebihnya kecil semua	<b>Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim (perspektif hukum perdata dan hukum islam)</b>
Tahun terbit		<b>2014</b>
Edisi	Tergantung dokumen	<b>Cet. 1</b>
Nomor Panggil	(nomor klasifikasi) + (3 huruf awal nama pengarang) + (huruf awal judul)	<b>346 THA a</b>
Klasifikasi		<b>346</b>
Tempat terbit		<b>D.I Yogyakarta</b>
Penerbit		<b>CV. ASWAJA PRESSINDO</b>
Deskripsi fisik	Jumlah halaman romawi pada buku, jml halaman buku,; tinggi buku	<b>X, 253 HLM. ; 23CM</b>
Bidang Hukum		<b>Hukum Islam</b>
ISBN	<b>Nomor ISBN buku</b>	<b>978-979-3925-83-7</b>
Eksemplar	Buku dengan judul yang sama namun memiliki nomor berbeda	
Bahasa		<b>Indonesia</b>
Gambar Sampul		
TEU Orang/Badan	Nama Pengarang (tanpa gelar dan dibalik)	<b>THAMRIN, HUSNI</b>
Subjek	Topik/ kata kunci dari isi dokumen	<b>HUKUM ISLAM</b>
File Dokumen	<b>Dikecualikan buku komersil karena berkaitan dengan hak cipta</b>	

## Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim (perspektif hukum perdata dan hukum islam)

Nomor Panggil  
346 THA a

Tahun Terbit  
2014

Klasifikasi  
346

ISBN  
978-979-3925-83-7

### Anotasi

Anak hasil bayi tabung menimbulkan problema hukum dari segi kedudukan, hak-hak dan hak mewaris. Buku ini mengulas permasalahan tersebut dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Penerbit  
CV. ASWAJA PRESSINDO

Deskripsi Fisik  
X, 253 HLM. ; 23CM

Bahasa  
Indonesia

Tempat Terbit  
DI Yogyakarta

Bidang Hukum  
Hukum Islam

### EKSEMPLAR

Kode Eksemplar	lokasi Rak	Status Buku
0114000827		Tersedia

### T.E.U BADAN

Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
THAMRIN, HUSNI	Nama Orang	Pengarang Utama

SUBJEK : HUKUM ISLAM -

JENIS DOKUMEN

BUKU HUKUM

COVER



[Lampiran](#)

**Hasil Inputan**

MacBook Pro

# Cara Pengisian Metadata Artikel (Majalah Hukum/Koran)



TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN  
DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL  
(RENEWABLE ENERGY GOVERNANCE IN THE ELECTRICITY SECTOR  
IN THE NATIONAL LAW DEVELOPMENT FRAME WORK)

Oleh: Nunuk Febriananingsih  
Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional  
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI  
Email: febrianasdah1@gmail.com

## ABSTRAK

Listrik merupakan sumber daya energi yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak. Pemerintah sudah berusaha untuk membebaskan Indonesia dari krisis energi listrik dan berupaya mencari alternatif penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah telah berkomitmen bahwa EBT akan terus dikembangkan untuk menjamin ketahanan energi di Indonesia serta memenuhi permintaan listrik yang kian bertambah. Pemerintah menetapkan target 23% porsi energi bersih dalam bauran energi nasional di tahun 2025 dan 31% pada tahun 2030 melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut Permen ESDM 50/2017) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga

Metadata	Cara Pengisian
<b>Tipe Dokumen</b>	Artikel Hukum
<b>Judul</b>	Yang benar: tuliskan judul artikel yang terdapat dalam MHN Contoh: Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional (Renewable Energy Governance In The Electricity Sector In The National Law Development Frame Work)
<b>Tempat Terbit</b>	Jakarta
<b>Tahun</b>	2019
<b>Bahasa</b>	Indonesia
<b>Sumber</b>	Contoh pengisian yang benar: MAJALAH HUKUM NASIONAL (NO.2), 2019, 29-56
<b>Bidang Hukum</b>	Bidang hukum yang dibahas dalam artikel/jurnal Misal : Hukum Administrasi Negara
<b>Lokasi</b>	Tempat dokumen fisik dikelola (nama instansi disingkat) BPHN
<b>TEU Orang / Badan</b>	Nama tokoh pengarang/instansi yang membuat artikel/majalah hukum (tanpa gelar dan dibalik) Contoh: Febriananingsih, Nunuk
<b>Subjek</b>	Kata kunci Artikel: KETENAGALISTRIKAN-PEMBANGUNAN HUKUM
<b>File Dokumen</b>	File Pdf, seharusnya (nama majalah-edisi-tahun-halaman jurnal) contoh nama file : MHN-02-2019-29-56.pdf





cari dokumen hukum lainnya...

CARI

## Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional (Renewable Energy Governance In The Electricity Sector In The National Law Development Frame Work)

JENIS DOKUMEN

ARTIKEL HUKUM

### Lampiran

mhn-02-2019-29-56.pdf

Tahun Terbit  
2019

Sumber

MAJALAH HUKUM NASIONAL (NO.2), 2019,  
29-56

Bahasa  
Indonesia

Bidang Hukum  
Hukum Umum

### T.E.U BADAN

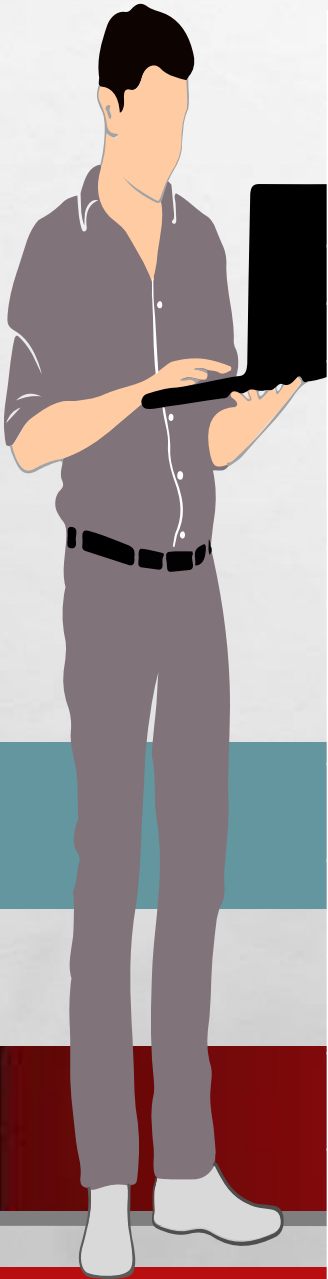
Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
Febriananingsih, Nunuk	Nama Orang	Pengarang Utama

SUBJEK : KETENAGALISTRIKAN-PEMBANGUNAN HUKUM -

Hasil Inputan

MacBook Pro

# Cara Pengisian Metadata Putusan Pengadilan

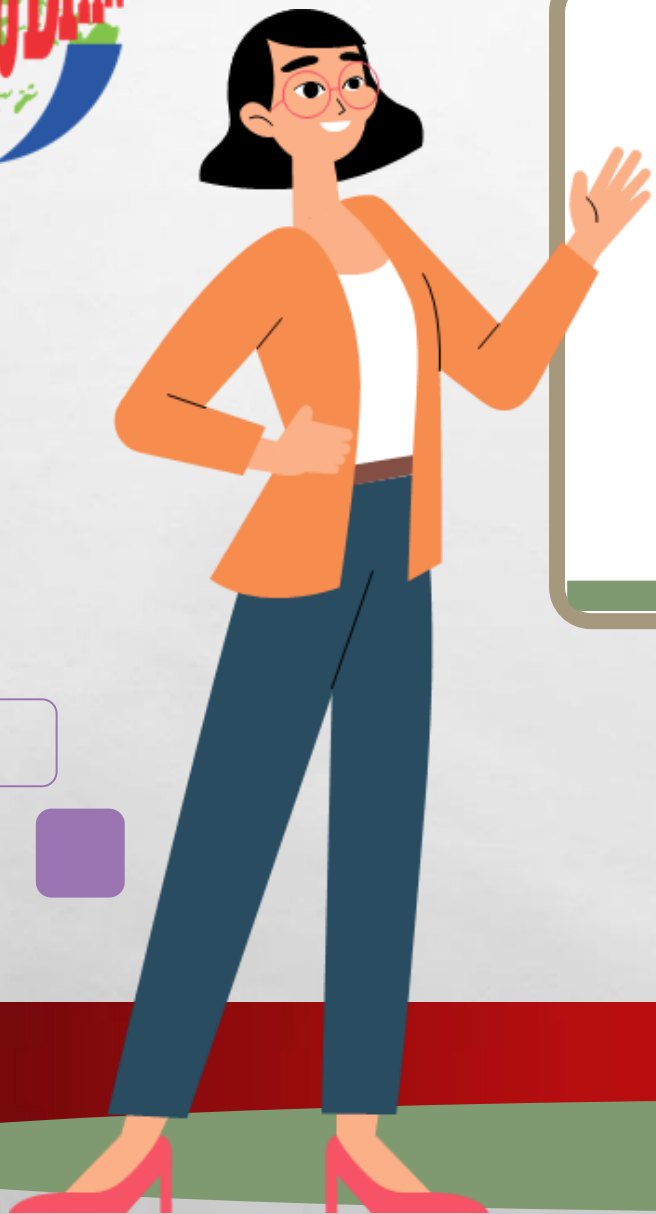


Metadata	Cara Pengisian
Tipe Dokumen	Putusan Pengadilan
Judul	Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 PK/Pdt/2016 tahun 2016 Rico Widjaya vs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Dkk
T.E.U Badan	Indonesia. Mahkamah Agung
Nomor Putusan	319 PK/Pdt/2016
Jenis Peradilan	Mahkamah Agung
Singkatan Jenis Peradilan	MA
Tempat Peradilan	Jakarta
Tanggal dibacakan	26 Juli 2016
Sumber	Mahkamah Agung
Subjek	SENGKETA TANAH
Status Putusan	TETAP
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum/Jenis Perkara	Hukum Perdata
Lokasi	Lokasi tempat Peraturan Fisik berada Contoh: jakarta
Lampiran	4 digit tahun perkara+singkatan peradilan+4 digit kode wilayah+nomor putusan Contoh: 2016MA0031319 PK/Pdt/2016



Standar Pengelolaan Dokumen  
Dan Informasi Hukum  
Permenkumham  
Nomor 8 Tahun 2019

merupakan  
**SALAH SATU INDIKATOR PENILAIAN  
PENGHARGAAN JDIHN**



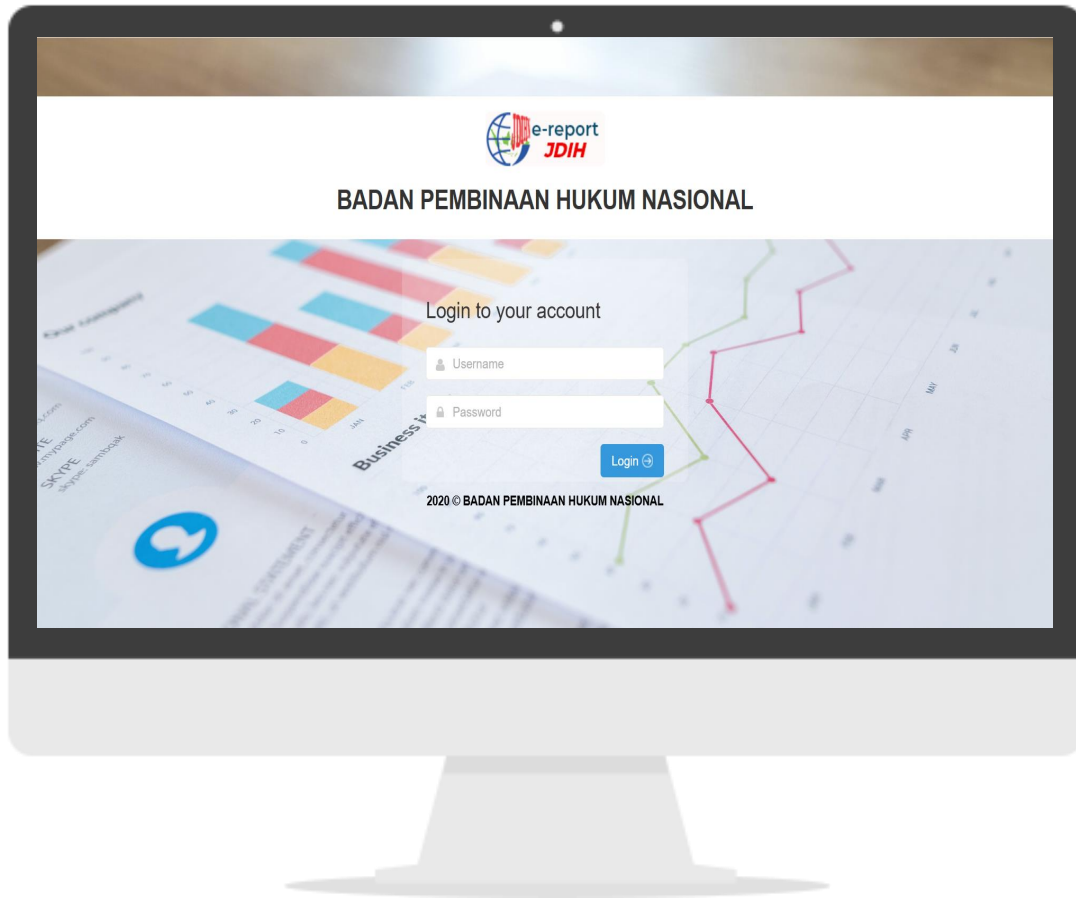
## Video Pedoman Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Website JDIH



**Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi  
Hukum Nasional  
@2021**

# Laporan Tahunan Pengelolaan JDIH

<https://e-report.jdihn.go.id/>



Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN

Mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting JDIHN

Laporan disampaikan pada setiap Bulan Desember [Perpres 33/2012 ttg JDIHN, Pasal 10 ayat (2) huruf f]



  
[www.jdihn.go.id](http://www.jdihn.go.id)

  
[@jdihnindonesia](https://www.instagram.com/jdihnindonesia)

  
JDIH Nasional

  
[@jdihnindonesia](https://twitter.com/jdihnindonesia)

  
[jdihn indonesia](https://www.youtube.com/jdihnindonesia)



# jdihn.go.id

JDIHN

DOKUMEN HUKUM

ANGGOTA

KEGIATAN

UNDUHAN

FAQ

MASUK



## KHAZANAH DOKUMEN HUKUM INDONESIA JDIHN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  
berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia

CARI DOKUMEN



Masukkan Kata Kunci

SILAHKAN  
CARI DOKUMEN

Jenis

Nomor

Tahun

Instansi

Status

CARI Q

Silahkan masuk ke laman JDIHN.GO.ID

## APLIKASI TERKAIT JDIHN



### E-Reporting

Aplikasi pelaporan pelaksanaan JDIH oleh anggota JDIHN



### SIKUNIK

Aplikasi daftar kunjungan anggota JDIHN ke Pusat JDIHN



### EVADATA

Aplikasi untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Perundang-Undangan

Klik aplikasi Pelaporan Anggota JDIHN (E-Report)



*Disclaimer:* Seluruh dokumen hukum yang terhimpun di dalam laman [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id) bersumber dari laman anggota JDIHN. Apabila terdapat keraguan atas isi dokumen di dalam laman ini, agar melakukan

### KONTAK KAMI

🏠 Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan, Jakarta  
☎ +6221-8091908

### TAUTAN

🌐 [kemenkumham.go.id](http://kemenkumham.go.id)  
🌐 [bphn.go.id](http://bphn.go.id)  
🌐 [ditippp.go.id](http://ditippp.go.id)

### SOSIAL MEDIA PUSAT JDIHN

Silahkan pantau dan ikuti kegiatan kami melalui sosial media berikut





## BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Login to your account

Username

Password

Login

Masukkan ID/User Name  
yaitu Nama Instansi :  
Kabupaten Lahat

Masukkan password standar  
yaitu : \$Er3p0rTH!ng//

Klik Login

2020 © BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL







SELAMAT DATANG,  
Kota Bogor

Setting

Dashboard

Data Profil JDIH

E-Report

Logout

# Dashboard

Klik Setting

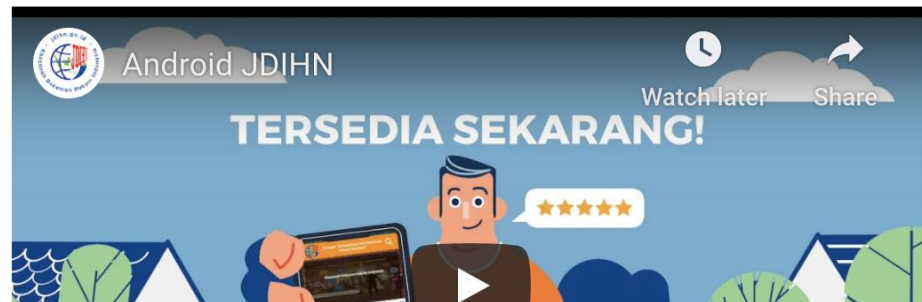
## Update JDIHN

- ...numan penting dari BPHN
- ...DIH tingkat Kota Pada tanggal 5 Desember 2020
- Pelatihan JFT Pengelola Prppustakaan
- Send documents to Mike 1 mins
- Go to the doctor dr Smith
- Plan vacation



Laporkan e-report JDIH  
Sebelum  
24 Desember 2020

## JDIH Video Corner



## NEWS corner

### Microsoft's Concept of How 2019 Will Look Like - Official Video

Uploaded on October 27, 2011

#### Science and Technology

What do you think the world will look like in 2019? Predicting future trends is usually done poorly by Analysts so company's seem to want to give consumer a glimpse of what they want the future to look like.

Microsoft has just released a video showcasing magical gadget after magical gadget.

Earlier this month "Microsoft Office Labs Vision 2019," was released and now we have "Productivity Future Vision (2011)". Both are inspiring and beautifully edited.



www.jdihn.go.id



@jdihnindonesia



JDIH Nasional



@jdihnindonesia



jdihn indonesia

## SETTING USER

### SETTING USER

Nama Pengguna Kota Bogor

username Kota Bogor

Password Lama masukan password lama anda

Password Baru masukan password baru

Cancel

Ganti Password

Masukan password lama yaitu : \$Er3p0rTH!ng//

Masukan password baru yang diinginkan

Klik Data Profil JDIH

Klik Ganti Password

**PERUBAHAN PASSWORD MOHON DICATAT !!!**



SELAMAT DATANG,  
Kota Bogor

Setting

Dashboard

Data Profil JDIH

E-Report

Logout

# Data Keanggotaan JDIH

Migrasi Data

ORGANISASI

SDM

KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

TEKNIS PENGELOLAAN

SARANA & PRASARANA

PEMANFAATAN TIK

PROMOSI JDIH

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA

PERMASALAHAN & KENDALA

SARAN

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id\_anggota

Filename: content/anggota\_view.php

Line Number: 64

Backtrace:

File:

/var/www/html/ereport/application/views/admin/content/anggota\_view.php

Line: 64

Function: \_error\_handler

File: /var/www/html/ereport/application/views/admin/main\_alt.php

Line: 49

Function: view

File: /var/www/html/ereport/application/controllers/Jdihn.php

Line: 48

Untuk memulai pengisian e-report, silahkan klik Migrasi Data bagi anggota yang sudah pernah mengisi e-report pada aplikasi sebelumnya



www.jdihn.go.id



@jdihnindonesia



JDIH Nasional



@jdihnindonesia



jdihn indonesia

# Data Keanggotaan JDIH

Pilih ORGANISASI

Lapokan E-Report

ORGANISASI

SDM

KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

TEKNIS PENGELOLAAN

SARANA & PRASARANA

PEMANFAATAN TIK

PROMOSI JDIH

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA

PERMASALAHAN & KENDALA

SARAN

edit logo

Untuk mengganti logo instansi silahkan klik Edit Logo

## Kota Bogor

Nama Instansi: Kota Bogor

Nomenklatur:

Jalan: Jl. Ir. H. Juanda No. 10

Kota: Kota Bogor

Provinsi: Jawa Barat

SOP Pengelolaan JDIH:

pada bagian paling bawah laman pilih Edit Data kemudian lakukan pengisian

Edit Data

## Data Keanggotaan JDIH

Pilih SDM

Pilih Tab Anggaran untuk mengisi data jumlah anggaran pengelolaan JDIH pada tahun penilaian

Lapokan E-Report

ORGANISASI **SDM** KOLEKSI DOKUMEN HUKUM TEKNIS PENYARANA & PRASARANA PEMANFAATAN TIK PROMOSI JDIH

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA PERMASALAHAN SARAN

Klik +Pelatihan kemudian lakukan pengisian pada masing-masing SDM

SDM **Pelatihan** Anggaran

Klik Tab Pelatihan

Klik Tab SDM

+ SDM

Klik +SDM kemudian lakukan pengisian, untuk penambahan data SDM lebih dari satu, klik Kembali +SDM kemudian lakukan pengisian

No	Jabatan	Nama Lengkap dan gelar	NIP	Pangkat/Golongan	Klasifikasi Pendidikan	Kontak	Action
----	---------	------------------------	-----	------------------	------------------------	--------	--------

Pilih Koleksi Dokumen Hukum

Untuk dokumen hukum selain yang ada dalam tabel pengisian, dapat ditambahkan dengan klik +Data Dokumen

Klik +input data di bagian kanan lakukan pengisian sesuai dengan jenis Dokumen Hukum

Klik Update Aspek KDH dan lakukan pengisian dan unggah bukti dokumen

ORGANISASI    SDM    **KOLEKSI DOKUMEN HUKUM**    TEKNIK

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA    PERMASALAHAN & KENDALA    SARAN

### III. KOLEKSI DOUKUMEN H

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jenis Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG

PERATURAN NON PER

DOKUMEN LANGKA

Judul Dokumen Langka

Jumlah Fisik / Hard Copy

Jumlah Otomasi di Website

Jumlah Telah Terintegrasi

Bukti Dokumen (\*screenshot website)

action

ASPEK KDH

Lapokan E-Report

+ DATA DOKUMEN PERUNDANG-UNDANG LAIN

+input data

+ DATA DOKUMEN NON PERUNDANG-UNDANG

+ DATA DOKUMEN LANGKA

UPDATE ASPEK KDH

# Data Keanggotaan JD IH

Pilih Teknis Pengelolaan

Lapokan E-Report

- ORGANISASI
- SDM
- KOLEKSI DOKUMEN HUKUM
- TEKNIS PENGELOLAAN**
- SARANA & PRASARANA
- PEMANFAATAN TIK
- PROMOSI JD IH
- PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA
- PERMASALAHAN & KENDALA
- SARAN

## IV. TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

ASPEK TPDH

UPDATE ASPEK TEKNIS PENGELOLAAN

Aspek	Kondisi	Bukti Dokumen	Action
Melakukan Penyampaian Laporan JD IH	tidak		
SOP Pengelolaan JD IH			
Standar Metadata Dokumen Hukum yang dikelola sudah (Hukum)			
Abstrak Dokumen Hukum yang dikelola sudah sesuai de			

Klik Update Aspek Teknis Pengelolaan dan lakukan pengisian sesuai kondisi pengelolaan JD IH disertai dengan unggah bukti dokumen

## Data Keanggotaan JDIH

### Pilih Sarana & Prasarana

Laporkan E-Report

ORGANISASI

SDM

KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

TEKNIS PENGELOLAAN

SARANA & PRASARANA

PEMANFAATAN TIK

PROMOSI JDIH

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA

PERMASALAHAN & KENDALA

SARAN

SARANA PRASARANA

Sarana & Prasarana

MEMILIKI RUANG KHUSUS KOLEKSI PERPUSTAKAAN (TERPISAH DENGAN RUANG KERJA DENGAN POSISI YANG STRATEGIS, MUDAH

YANG TERPISAH DARI RUANG KOLEKSI)

TEKNIK PENGELOLA JDIH

Action

+input data

+input data

+input data

INPUT SARANA PRASANA LAIN

Kondisi

Tahun

Jumlah

Bukti Dokumen

Action

kemudian pilih +input data di bagian kanan tabel kemudian lakukan pengisian disertai dengan unggah bukti dokumen

Untuk sarana dan prasarana selain yang ada dalam tabel pengisian, dapat ditambahkan dengan klik Input Sarana Prasarana Lain



## Data Keanggotaan JDIH

Pilih Pemanfaatan TIK

Lapokan E-Report

ORGANISASI

SDM

KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

TEKNIS PENGELOLAAN

SARANA &amp; PRASARANA

PEMANFAATAN TIK

PROMOSI JDIH

PENGUATAN ORGANISASI &amp; KERJASAMA

PERMASALAHAN &amp; KENDALA

SARAN

## VI. ASPEK PEMANFAATAN TIK

UPDATE PTIK

Aspek	Kondisi	Bukti Dokumen	Action
Alamat Website JDIH (domain name) merupakan subdomain dari website utama instansi (*contoh: jdih.kemenkumham.go.id)			
Memuat Logo JDIH di pojok kiri atas Website JDIH			
Menampilkan link/alamat Website Anggota JDIH di bawah instansi			
Memiliki Fitur Penelusuran Dokumen Hukum (advance search)			
Memiliki Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan			
Website JDIH sudah terintegrasi dengan JDIH.GO.ID			
Website JDIH dilengkapi dengan sistem keamanan, ditandai dengan			
Anggota JDIH memiliki aplikasi berbasis mobile yang dapat diakses			

klik Update PTIK dan lakukan pengisian sesuai kondisi pengelolaan JDIH disertai dengan unggah bukti dokumen



www.jdihn.go.id



@jdihnindonesia



JDIH Nasional



@jdihnindonesia



jdihn indonesia

## Data Keanggotaan JDIH

Pilih Promosi JDIH

Lapokan E-Report

ORGANISASI

SDM

KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

TEKNIS PENGELOLAAN

SARANA & PRASARANA

PEMANFAATAN TIK

PROMOSI JDIH

KENDALA

SARAN

Untuk Promosi JDIH selain yang ada dalam tabel pengisian, dapat ditambahkan dengan klik +Tambah Kategori Promosi JDIH

+ TAMBAH KATEGORI PROMOSI JDIH

Kondisi	Nama media	Bukti Dokumen	Action
			+input
Sosialisasi JDIH Melalui Media Massa/Cetak			+input
FACEBOOK			+input
INSTAGRAM			+input
TWITTER			+input
YOUTUBE			+input
MEDIA PROMOSI LAINNYA			+input

kemudian pilih +input data di bagian kanan tabel kemudian lakukan pengisian disertai dengan unggah bukti dokumen

## Data Keanggotaan JD IH

Pilih Penguatan Organisasi & Kerjasama

Lapokan E-Report

ORGANISASI   SDM   KOLEKSI DOKUMEN HUKUM   PENGELOLAAN   SARANA & PRASARANA   PEMANFAATAN TIK   PROMOSI JD IH

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA   PERMASALAHAN & KENDALA   SARAN

### VIII. PENGUATAN ORGANISASI DAN KERJASAMA

Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan JD IH di Tahun Penilaian

+ INPUT DATA

Nama Pelatihan	Tanggal	Tempat Pelatihan	Tingkat Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Bukti Foto Kegiatan	Action
----------------	---------	------------------	--	---------------------	--------

Melakukan Study Banding (dalam Tahun Penilaian)

+ INPUT DATA

Nama Pelatihan	Tanggal	Tempat Pel	Bukti Foto Kegiatan	Action
----------------	---------	------------	---------------------	--------

Melakukan Koordinasi & Konsultasi baik ke BPHN/Pusat JD IH

+ INPUT DATA

kemudian pilih +input data pada masing-masing bagian kanan tabel kemudian lakukan pengisian disertai dengan unggah bukti dokumen

## Data Keanggotaan JDIH

Pilih Permasalahan & Kendala

Laporkan E-Report

ORGANISASI    SDM    KOLEKSI DOKUMEN HUKUM    TATA KELOLAAN    SARANA & PRASARANA    PEMANFAATAN TIK    PROMOSI JDIH

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA    **PERMASALAHAN & KENDALA**    SARAN

### IX. Permasalahan dan Kendala

PERMASALAHAN / KENDALA YANG DIHADAPI DALAM  
MENGELOLA JDIH

- Terbatasnya jumlah SDM pengelola JDIH
- Terbatasnya sarana/prasarana pengelolaan JDIH
- Sulitnya akses internet/jaringan
- SDM Pengelola JDIH belum mendapatkan pelatihan
- Kurangnya sosialisasi JDIH

Klik/centang pada kotak yang tersedia sesuai kondisi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH kemudian dijelaskan dalam kolom Uraian berikut dengan upaya yang telah dilakukan

klik Submit

URAIAN

Cancel    Submit

## Data Keanggotaan JD IH

ORGANISASI    SDM    KOLEKSI DOKUMEN HUKUM    TEKNIS PENGELOLAAN    SARANA & PRASARANA    PEMANFAATAN TIK    PROMOSI JD IH

PENGUATAN ORGANISASI & KERJASAMA    PERMASALAHAN & KENDALA    **SARAN**

Laporkan E-Report

X. SARAN

Pilih Saran

Setelah pengisian laporan selesai dilakukan, klik Laporkan e-report untuk **MENGIRIMKAN LAPORAN**, pilih Tahun Laporan yang akan disampaikan kemudian klik Laporkan

klik Submit untuk menyimpan data isian

lakukan pengisian pada kolom Saran dan Masukan atas pengelolaan JD IH

# Bentuk Kegiatan yang dapat dilaksanakan

1. Pengelolaan JDIH
2. Koordinasi/Konsultasi JDIH
3. Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan JDIH
4. Mengikuti/Menghadiri Kegiatan JDIHN
5. Rapat Koordinasi JDIH
6. BIMTEK/FGD/Sosialisasi JDIH
7. Promosi JDIH dan Lomba Menulis Artikel
8. Penilaian Anggota JDIH Terbaik (oleh Pusat JDIH)
9. Pengadaan Buku Hukum
10. Peningkatan Sarana/Prasarana



# PERHATIAN!

- Setiap **perubahan/penambahan** yang dilakukan pada data e-Reporting JDIHN **TIDAK SECARA LANGSUNG** masuk ke dalam **Laporan yang sudah dilaporkan sebelumnya**;
- Setelah melakukan **perubahan/penambahan** pada data e-Reporting JDIHN, **HARUS MENGIRIMKAN KEMBALI LAPORAN YANG TERBARU** dengan mengklik

 Lapokan E-Report





**Cari  
Dokumen  
Hukum?**

**JDIHN.GO.ID  
saja**



Informasi lebih lanjut,  
kunjungi **media sosial** kami

-  [jdih nasional](#)
-  [jdihnindonesia](#)
-  [jdihnindonesia](#)
-  [jdihn Indonesia](#)

**TERIMA KASIH**